



FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN SISTEM OTONOMI DAERAH

Muhammad Fajar, Hevi Dwi Oktaviani

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat (sentral) kepada pemerintah daerah (desentralisasi) untuk mengelola, memberdayakan dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerahnya masing - masing. Pemberlakuan UU otonomi daerah yang mulai berjalan dengan semestinya mulai berdampak kepada pembangunan daerah - daerah di Indonesia yang perlahan mulai tubuh ke arah yang lebih baik mulai dari efisiensi sistem birokrasi di daerah - daerah hingga pengelolaan dapur di daerah menjadi tanggung jawab daerah masing - masing. Namun terlepas dari banyaknya keuntungan ataupun kelebihan yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terdapat juga sebuah kekurangan dari sistem otonomi daerah ini sendiri yang bisa menjadikan sebuah batu ganjalan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan roda pemerintah di Indonesia. Terlepas dari itu, ada faktor - faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan sistem otonomi daerah di Indonesia baik itu faktor internal maupun eksternal yang dapat menjadi sebuah nilai positif ataupun negatif dalam pelaksanaan sistem otonomi daerah itu sendiri.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Faktor - faktor, Eksternal dan Internal.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat (sentral) kepada pemerintah daerah (desentralisasi) untuk mengelola, memberdayakan dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerahnya masing - masing. Namun sebelum era reformasi sistem otonomi daerah di Indonesia belum berjalan sesuai dengan ketentuannya, karena masih sangat otoriternya pemerintah pusat yang dimana segala macam urusan mengenai daerah masih harus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengambil sebuah keputusan mengenai urusan apapun di daerah. Selain itu pada era sebelum reformasi pemusatan pembangunan lebih difokuskan di daerah pulau Jawa yang dimana menyebabkan wilayah - wilayah lain di Indonesia mengalami ketertinggalan dalam hal pembangunan baik itu infrastruktur ataupun SDM sendiri. Semua mulai menemukan titik terang ketika era reformasi yang dimana sistem otonomi daerah yang sudah jelas bahwa UUD 1945 mengamanatkan itu semua. Selain UUD 1945 pemerintah

era reformasi juga membentuk UU mengenai otonomi daerah yaitu UU NO 22 dan NO 25 tahun 1999 lalu dilakukan pembaharuan hukum melalui UU NO 32 tahun 2004 mengenai pemerintah daerah dan UU NO 33 tahun 2004 mengenai perimbangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Setelah adanya UU tersebut segala sesuatu urusan yang ada di daerah diserahkan langsung kepada pemerintah daerah masing - masing untuk mengurus sendiri urusan dapur daerah mereka masing - masing sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU terkait.

Pemberlakuan UU otonomi daerah yang mulai berjalan dengan semestinya mulai berdampak kepada pembangunan daerah - daerah di Indonesia yang perlahan mulai tubuh ke arah yang lebih baik, sehingga memberikan dampak yang baik kepada masyarakat di daerah tersebut, mulai dari segala macam urusan mengenai kependudukan dan kewarganegaraan bisa diurus atau diproses di daerah masing - masing tanpa harus melakukan pengurusan ke pemerintah pusat yang mana dengan kondisi geografis wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan ini dapat menimbulkan efek efisiensi waktu dan juga percepatan. Lalu otonomi daerah dapat meningkatkan daya saing masyarakat antar daerah yang juga bisa meningkatkan kualitas dari SDM setiap daerah itu sendiri sehingga pemerataan kualitas SDM di Indonesia bisa berjalan dengan cepat dan yang paling terpenting adalah masyarakat setiap daerah di Indonesia bisa mencapai kesejahteraan sosial yang merata di setiap daerahnya.

Namun terlepas dari banyaknya keuntungan ataupun kelebihan yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terdapat juga sebuah kekurangan dari sistem otonomi daerah ini sendiri yang bisa menjadikan sebuah batu ganjalan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan roda pemerintah di Indonesia. Akibat penerapan sistem otonomi daerah di Indonesia yang terlambat dilaksanakan pada era - era sebelumnya terdapat sebuah kesenjangan kualitas SDM di beberapa daerah karena masih tertinggalnya daerah tersebut sehingga itu menjadikan sebuah hambatan daerah tersebut untuk melakukan atau menerapkan sistem otonomi daerah dengan cepat, efisien dan cermat. Selain itu juga bisa tercipta egosentrisme antara daerah masing - masing yang bisa menciptakan sebuah perpecahan antar daerah. Selain dari faktor terlambatnya dan juga kekeliruan penerapan sistem otonomi daerah pada era - era sebelumnya terdapat juga beberapa faktor lain yang mempengaruhi penerapan sistem otonomi daerah itu sendiri.

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah disusun di atas, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi penerapan sistem otonomi daerah.

PEMBAHASAN

Setelah penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode kepustakaan yang penulis dapatkan dari literatur - literatur dan juga peraturan perundang - undangan terkait maka menghasilkan pembahasan yaitu :

Terdapat beberapa faktor - faktor yang menjadi kunci penerapan sistem otonomi daerah di Indonesia antara lain yaitu :

1. FAKTOR INTERNAL DAERAH

A. Faktor Sumber Daya Manusia (Sdm)

Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat krusial dalam hal ini karena manusia adalah yang membuat dan menjalankan sistem otonomi daerah

itu sendiri sehingga diperlukan kualitas sumber daya manusia yang sangat baik dalam menjalankan sistem otonomi daerah ini yang dimana manusia ini akan berperan sebagai kepala daerah dan aparatur dari pada daerah itu sendiri. Maka dari itu, perlu diciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompeten untuk menunjang sistem otonomi daerah agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dan dengan kualitas yang baik dari sumber daya manusia dapat menciptakan sebuah daerah yang unggul dan kompeten. Selain itu juga manusia sebagai pemegang kontrol dari sistem otonomi daerah ini harus saling bersinergitas antar pemangku kepentingan pada sistem pemerintahan daerah guna untuk mmenggerakkan dan menggali seluruh potensi yang ada didaerah masing - masing. Agar terciptanya semua ke sinergitas dan profesionalisme terhadap SDM maka harus melakukan pengelolaan yang dimulai dari melakukan recruitmen, penempatan, pembinaan, pelatihan, pendidikan dan juga menjalin kerja sama antar satu dengan lainnya.

B. Faktor Apbd Dan Pendapatan Daerah

APBD berperan sangat penting didalam suatu daerah, karena pelaksanaan kehidupan didaerah baik pelaksanaan pemerintahan hingga masyarakatnya sangat bergantung kepada APBD itu sendiri. Meskipun tidak selalu berpaku pada APBD, namun tidak akan bisa berjalan berbagai kegiatan untuk menunjang pertumbuhan daerah tersebut yang menjadi tugas pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat di daerah tersebut. APBD merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Wajong (1975 : 97) mengatakan terdapat tiga dimensi berkenaan dengan pentingnya pengelolaan keuangan daerah, yaitu a) dimensi kebijaksanaan yakni bahwa pengendalian keuangan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan penduduk daerah, sehingga kebijakan yang ditempuh dapat menyebabkan kemakmuran atau sebaliknya kelemahan dapat membawa kejatuhan bagi penduduk daerah. Selanjutnya b) dimensi kepandaian mengendalikan, maksudnya bahwa kepandaian mengendalikan keuangan daerah yang baik dapat mengarahkan kebijaksanaan untuk melindungi dan memperbesar harta daerah, dan c) dimensi anggaran, artinya anggaran adalah alat utama pada pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang diperhadapkan pada legislatif haruslah tepat agar tidak menimbulkan kekurangan atau kerugian bagi daerah tersebut.¹ Dengan demikian jelas bahwa ketersediaan keuangan daerah yang memadai sangat penting dalam melaksanakan otonomi daerah, keleluasaan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik bukan hanya didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh pusat, melainkan yang terpenting adalah sarana untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka ketersediaan APBD yang memadai merupakan prasyarat utama untuk melaksanakan kewenangan tersebut, tetapi perlu dipahami bahwa dengan struktur APBD saat ini jangan pula daerah justru banyak berharap dari dana perimbangan dari pusat, seharusnya dengan otonomi daerah ketergantungan

keuangan dari pusat harus dikurangi.² Beberapa daerah di Indonesia mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat dalam hal pemerintah anggaran untuk pembangunan di daerahnya, hal ini bukan tanpa sebab tapi karena daerah tersebut masih sangat tertinggal dari daerah - daerah yang lainnya sehingga pemerintah pusat mengambil langkah pemerintah dana otonomi khusus daerah untuk mempercepat pembangunan baik infrastruktur maupun bidang lainnya di daerah tersebut. Dana otonomi khusus sendiri diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2008.

Selain peran besar APBD, pendapatan daerah pun dapat menunjang keberlangsungan dari sistem otonomi daerah. Dimana pendapatan daerah baik itu secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan baik itu infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia di daerah tersebut.

C. Aset Daerah

Aset daerah di setiap wilayah Indonesia memiliki keanekaragamannya masing - masing sehingga tidak bisa dikatakan setiap daerah memiliki aset daerah yang sama satu dengan lainnya. Aset daerah merupakan salah satu faktor yang dianggap penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena bisa mempengaruhi penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah dalam melayani masyarakatnya serta juga untuk menunjang kegiatan birokrasi dengan baik, efisien, transparan, akuntabel dan juga bertanggung jawab.

Selain menjadi bagian penunjang dalam sistem otonomi daerah, aset daerah juga bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang potensial jika dikelola dengan baik. Maksud daerah pendapatan daerah disini yaitu melalui pajak atau retribusi yang sesuai dengan aturan terkait. Contoh aset yang memberikan pendapatan tambahan kepada daerah adalah bandara yang memberikan pajak atau retribusi walaupun tidak semua wilayah tidak memiliki bandara. Lalu pasar baik itu modern ataupun tradisional yang bisa memberikan kontribusi retribusi kepada pemerintah daerah.

D. Kondisi Geografis Daerah

Kondisi geografis wilayah Indonesia yang beranekaragam bisa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan sistem otonomi daerah karena kondisi geografis mempengaruhi pembangunan infrastruktur di setiap daerah. Jika kondisi geografis di wilayah yang datar lebih mudah untuk melakukan pembangunan jalan - jalan yang diperuntukan sebagai salah satu penunjang percepatan pertumbuhan kehidupan masyarakat serta juga percepatan dalam hal kegiatan pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakatnya.

Namun berbeda halnya jika kondisi geografis di suatu wilayah didominasi dengan dataran tinggi dan juga pengunungan, akan menjadi sebuah

hambatan yang sangat besar karena pembangunan akses jalan sebagai penghubung antar daerah menjadi lebih sulit. Contoh di daerah papua yang mayoritas wilayahnya adalah pegunungan, disana akses jalan sangatlah sulit yang dimana letak desa diwilayah tersebut rata - rata di dalam hutan sedangkan letak pemerintahan daerah berada diwilayah yang datar dan juga jauh dari desa - desa. Sehingga pembangunan disana harus direncanakan secara matang dan cermat karena jika tidak maka akan membahayakan masyarakat disana. Sebelum adanya pembangunan berskala besar yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat akhir - akhir ini pilihan transportasi diwilayah papua terutama di kabupaten Nduga hanya berjalan kaki melewati hutan yang dimana bisa memakan waktu 5 - 6 jam untuk sampai ke desa - desa disana atau menggunakan helikopter. Namun dengan biaya transportasi menggunakan helikopter yang sangat mahal maka rata - rata masyarakat disana memilih untuk melakukan perjalanan via darat atau berjalan kaki.

2. FAKTOR EKSTERNAL DAERAH

Selain faktor dari dalam daerah, faktor eksternal juga berperan sangat penting dalam pelaksanaan sistem otonomi daerah sendiri. Faktor eksternal dari daerah yaitu :

A. Faktor Investasi Asing

Faktor investasi asing bisa menjadi pengaruh yang besar bagi sistem otonomi daerah, karena investasi asing bisa menjadi sebuah acuan dimana roda perekonomian daerah tersebut berjalan dengan lancar dan baik yang juga bisa berdampak kepada pendapat daerah yang meningkat dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat daerah tersebut.

B. Faktor Kerja Sama Dengan Negara Lain

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 mengatakan bahwa daerah berhak untuk menjalin kerja sama antar daerah dan juga pihak ketiga yang dimana dari kerja sama tersebut harus bersifat mensejahterakan masyarakatnya. Contoh terbaru daerah yang menjalin kerja sama dengan pihak ketiga atau asing adalah DKI Jakarta yang sedang menjalin kerja sama dengan penyelenggara Formula - E untuk diselenggarakan di DKI Jakarta yang dimana itu bisa memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta jika dilakukan dengan tujuan kesejahteraan umum.

KESIMPULAN

Pelaksanaan sistem otonomi daerah dapat berjalan dengan baik atau tidak tergantung kepada dua faktor yaitu :

1. Faktor internal daerah
 - a. SDM (Sumber Daya Manusia)
 - b. APBD dan Pendapatan Daerah
 - c. Aset Daerah
 - d. Kondisi Geografis Daerah

2. Faktor eksternal
 - a. Investasi Asing
 - b. Kerja Sama dengan Negara Lain

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ferizaldi, SE., Msi., Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia,2016,Unimal
Perss,Makassar

Peraturan Perundang - Undangan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020